



DELI DAN SUMATERA TIMUR DALAM PUSARAN POLITIK KAWASAN KOLONIAL BELANDA

Syaiful Anwar*

Program Studi Sejarah Peradaban Islam, Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek, Indonesia

ABSTRACT

This paper discusses the regional politics that occurred in the land of Deli and the Residency of East Sumatra during the Dutch colonial period. The formation of administrative areas is influenced by various conditions such as topography, culture, economy, and politics. The focus of the study in this paper lies in the political influence that shaped Deli and East Sumatra as part of the colonial administration in the Dutch East Indies region. The qualitative method is the tendency to discuss this historical study involving heuristics through various kinds of literature, criticisms, interpretations, and historiography. The study results show that the area known as North Sumatra today has started from the establishment of Deli as a sovereign territory, the emergence of various sultanates around it, to clustering in the administrative map of East Sumatra as part of the Dutch East Indies region.

ARTICLE HISTORY

Submitted 03 September 2022
Revised 10 September 2022
Accepted 14 September 2022
Published 20 October 2022

KEYWORDS

Deli; East Sumatra; Regional Politics; Dutch Colonial.

CITATION (APA 6th Edition)

Anwar, S. (2022). Deli dan Sumatera Timur dalam Pusaran Politik Kawasan Kolonial Belanda. *MUKADIMAH: Jurnal Pendidikan, Sejarah, dan Ilmu-Ilmu Sosial*. 6(2), 466-474.

*CORRESPONDENCE AUTHOR

nyaifulanwar@iainbukittinggi.ac.id

DOI: <https://doi.org/10.30743/mkd.v6i2.6075>

PENDAHULUAN

Pada awal abad ke-19, masyarakat Eropa sama sekali tidak mengenal kawasan Sumatera Timur. Namun, di saat yang sama nama "Deli" menjadi primadona bagi sebagian masyarakat Eropa, khususnya para pengusaha. Mereka mengenal Deli bukan sebagai sebuah kawasan di Hindia-Belanda, melainkan sebagai suatu nama produk daun tembakau yang memang dihasilkan di daerah Deli. Tembakau Deli pada awal kemunculannya menjadi primadona sebagai daun pembungkus cerutu yang bermutu tinggi yang harganya 15 gulden per pon, tiga kali lipat dari tembakau Jawa (Darsono, Astiyah, Azhari, Suryanti, & Akbar, 2017). Pada perkembangannya, Deli bukan hanya menjadi kawasan perkebunan tembakau, melainkan berbagai macam tanaman tropika lain yang diminati pasar dunia. Dalam perkembangannya nama Deli menjadi nama yang umum digunakan dalam percakapan sehari-hari untuk merujuk Sumatera Timur (Bremen, 1997).

Melalui produk Tembakau Deli tersebut, maka perkembangan kawasan tanah Deli pada akhirnya menjadi incaran para pengusaha Eropa yang berbondong-bondong ikut mendirikan usaha perkebunan. Perkembangan yang signifikan mengubah wilayah yang dahulunya hutan belantara menjadi hamparan perkebunan yang sangat luas. Hal ini juga berdampak pada situasi sosial, budaya, ekonomi, dan politik karena masifnya para pendatang – baik sebagai pengusaha, kuli, dan para imigran – ke wilayah Deli. Perkembangan selanjutnya bisa ditebak, perubahan signifikan tersebut mengubah peta administratif semakin melebar; penguasa lokal muncul dan dikenal sebagai pemilik sah wilayah; pengusaha perkebunan meramaikannya dengan berbagai infrastruktur dan membentuk perkotaan beserta perangkat modernisasinya. Pada akhirnya Hindia-Belanda menancapkan otoritasnya pada wilayah ini, ketika akhirnya ibukota keresidenan dipindahkan ke Kota Medan.

Perubahan yang menurut Pelzer luar biasa sekaligus merusak bentang alam Sumatera Timur itu berlaku singkat. Ketika awal abad ke-19, Sumatera Timur tidak dikenal sama sekali, namun pada akhir abad ke-19, Sumatera Timur justru dikenal sebagai salah satu wilayah penunjang perekonomian utama Hindia-Belanda di luar Pulau Jawa. Pada masa-masa itu pula dikenal sultan-sultan yang



menjadi bagian Sumatera Timur. Dalam berbagai sumber kolonial disebutkan bahwa nama-nama Serdang, Asahan, Langkat dan Deli baru dikenal sebagai sebuah kesultanan (Pelzer, [1985](#)). Pada masa-masa sebelumnya para pengelana Eropa lebih mengenal Aceh atau Siak sebagai sebuah kesultanan besar yang bahkan berganti-ganti dalam menguasai wilayah pesisir yang kelak disebut sebagai Sumatera Timur. Sementara nama Serdang, Asahan, Langkat, dan Deli muncul dan berkembang selaras dengan perkembangan ekonomi perkebunan di Sumatera Timur.

Melalui asumsi bahwa kesultanan dibentuk oleh pihak kolonial sendiri, maka terdapat suatu politik kawasan yang berpengaruh terhadap pembentukan kesultanan. Politik kawasan bisa dikatakan sebagai kebijakan politik dan kekuasaan dalam perbatasan wilayah yang disepakati oleh dua atau lebih pihak. Termasuk pada hak dan kepemilikan segala isinya di dalam suatu wilayah. Oleh sebab itu, pertanyaan yang bisa diajukan dalam artikel ini adalah: bagaimana Deli dan Sumatera Timur menjadi suatu wilayah otoritatif dengan bentuk kesultanan dan keresidenan? Apakah tujuan pembentukan kawasan dengan otoritatif seperti itu?

Dalam berbagai sumber menyatakan bahwa Deli menjadi bagian dari Kesultanan Aceh sejak awal abad ke-17 M pada masa Ali Mughayat Syah. Menurut Azhari, kekuasaan Aceh bermula pada penyerangan terhadap Haru dan menempatkan salah satu panglimanya, Gocah Pahlawan, sebagai wali/perwakilan di wilayah tersebut (Azhari, Pakpahan, Tanjung, Faridah, & Abdurrahman, [2013](#)). Tradisi lokal merekamnya dalam kisah *Putri Hijau*. Suatu peninggalan reruntuhan benteng di Deli Tua dipercaya beberapa sejarawan sebagai salah satu situs Benteng Putri Hijau dalam sisa-sisa penyerangan Aceh. Terlepas dari itu, belum ada menyebutkan bahwa Deli di masa lalu adalah suatu kerajaan yang besar, atau setidaknya dikenal sebagai wilayah yang berdaulat secara kawasan. Jan Breman menyatakan bahwa Deli adalah wilayah yang rutin memberikan upeti kepada kesultanan Aceh, termasuk ketika Siak berhasil merebut Deli menjadi wilayahnya. Deli sebagai wilayah menjadi ruang administratif yang terbentuk melalui taklukan oleh kerajaan Siak atau Aceh telah berganti-ganti menjadi pemimpin wilayah tersebut (Breman, [1997](#)). Namun, ketika Belanda mulai melihat pentingnya wilayah Deli sebagai sumber ekonomi, Sumatera Timur hadir sebagai suatu wilayah keresidenan Hindia-Belanda yang di dalamnya terdapat berbagai kesultanan yang mengikuti. Perubahan ini dimulai dengan Traktat Siak 1858 M ketika Siak mengakui kedaulatan Hindia-Belanda bersama hak-haknya di Sumatera Timur. Pernyataan historis bahwa negeri tersebut sebagai bentukan kolonial hadir dalam bentuk politik kawasan kolonial untuk penaklukan seluruh Sumatera dengan berbagai alasan khusus dalam ekonomi dan politik di kawasan Selat Malaka.

METODE

Dalam penulisannya penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah. Menurut Gottchalk, metode penelitian sejarah adalah proses menguji dan menganalisis kesaksian sejarah guna menemukan data yang otentik dan dapat dipercaya, serta usaha sintesis atas data semacam itu menjadi kisah sejarah yang dapat dipercaya (Gottschalk, [1986](#)). Sementara menurut Kuntowijoyo, terdapat lima tahapan dalam penelitian sejarah, yaitu: pemilihan topik, pengumpulan sumber, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi (Kuntowijoyo, [1994](#)). Penelitian ini berfokus kepada pembahasan seputar bagaimana pengaruh pemerintah Hindia-Belanda dalam memainkan politik kawasan di kawasan Sumatera Timur, khususnya Deli. Penelitian ini sepenuhnya menggunakan pendekatan studi literatur dengan menganalisis sumber-sumber sekunder berupa buku dan artikel ilmiah terkait wacana yang menjadi fokus masalah. Jadi, tidak ada sumber primer berupa manuskrip dan arsip-arsip sezaman yang dicari lebih dalam. Oleh karena itu, penelitian ini cenderung mengelaborasi wacana politik kawasan yang tergambar dalam literatur-literatur yang dalam setengah abad ini lazim digunakan sejarawan sebagai rujukan untuk merekonstruksi sejarah Deli dan Sumatera Timur, misalnya John Anderson ([1825](#)), Anthony Reid ([2010](#); [2012](#)), Jan Breman ([1997](#)), William Marsden ([2008](#)), Daniel Perret ([2010](#)), Karl J. Pelzer ([1985](#)), W.H.M. Schadee ([1918](#)), dan Tengku Luckman Sinar ([1991](#); [2006](#)).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sumatera Timur sebagai Wilayah Administratif

Pada pertengahan abad ke-19, Belanda memulai cara-cara politik dalam menanamkan pengaruhnya di Sumatera Timur. Menurut Schadee, penguasaan Sumatera Timur bertujuan untuk menghambat pengaruh Inggris di Malaka yang terus meluas. Pada awal abad ke-19, Inggris telah menaruh minat terhadap Sumatera Timur dengan diutusnya naturalis Anderson (1822-1823) untuk meneliti wilayah tersebut. Akan tetapi ketika pecah perang Inggris dengan Perancis, hal itu terkubur sampai munculnya traktat Siak 1858. Traktat ini adalah fondasi awal politik kawasan Hindia-Belanda dalam menanamkan berbagai pengaruh dan kepentingan di Sumatera Timur (Schadee, [1918](#)).

Hubungan Sumatera Timur dengan Inggris bisa dikatakan hanya sebatas pada ikatan komersial. Inggris membutuhkan lada dan beberapa tanaman pangan yang diusahakan pada wilayah-wilayah Serdang, Asahan, Deli dan Langkat yang dikirim ke Penang. Hubungan ini juga melalui perantara oleh orang-orang Cina yang dianggap bagian dari Inggris. Setelah Traktat Siak, Belanda menganggap bahwa pengaruh Inggris akan mengganggu jalannya pemerintahannya di wilayah Siak sehingga perlu untuk menegaskan kembali pengaruh Belanda di Sumatera Timur (Breman, [1997](#)). Terlebih ketika orang-orang Cina menjadi tulang punggung perkebunan awal di Sumatera Timur.

Dasar yang digunakan oleh Belanda berkuasa di Sumatera Timur adalah pengaruh Siak pada wilayah Sumatera Timur di masa silam. Pada awal abad ke-19, wilayah Sumatera Timur sempat menjadi negeri taklukan Kesultanan Siak (Sinar, [2006](#)). Belanda menganggap bahwa sebagai negeri taklukan Siak, Sumatera Timur juga menjadi bagian dari Hindia-Belanda. Sebab, Kesultanan Siak pernah menjadi bagian dari kekuasaan “Belanda” atas nama Vereenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) pada 1745. Meskipun pada masa-masa VOC tersebut wilayah Sumatera Timur nyaris tidak diperhatikan, pada akhirnya berubah menjadi wilayah terpenting di luar Pulau Jawa dalam fondasi ekonomi Hindia-Belanda (Reid, [2010](#)).

Belanda memulainya dengan kunjungan Netscher pada 1862. Kunjungan tersebut lebih tepatnya sebagai pameran militer angkatan laut Belanda dalam rangka mengintimidasi penguasa setempat. Deli langsung takluk karena statusnya yang tidak seberapa berarti dibandingkan wilayah-wilayah lain (Breman, [1997](#)). Sikap yang seperti itu membuat Belanda menaikkan derajat Deli setaraf dengan Siak sehingga keduanya tidak memiliki hubungan atasan dan bawahan. Berbeda dengan negeri-negeri lain seperti Serdang, Asahan, dan Langkat yang memerlukan pameran militer beberapa kali. Langkat misalnya, masih merasa kuat dengan dukungan dari Kesultanan Aceh yang menyokong di belakang. Pada akhirnya, dalam tahun 1865, negeri-negeri di Sumatera Timur takluk melalui beberapa kali pameran militer. Setelah penaklukan secara intimidatif tersebut status negeri-negeri turut dipersamakan dengan berbagai kesultanan yang ada di Sumatera. Sejak itu kolonisasi mulai mencengkeram seluruh Sumatera Timur. Khususnya ketika tembakau yang dibawa Jacob Nienhuys menunjukkan prospek cerah ekonomi perkebunan.

Keberhasilan tembakau di pasar dunia dalam percobaan pertama melahirkan Deli Maatschappij sebagai perusahaan rintisan pada 1869. Perusahaan tersebut mengelola secara intensif pembukaan baru di wilayah-wilayah kesultanan yang telah dipersamakan tersebut. Hutan-hutan purba yang misterius mulai berganti pada hamparan perkebunan tembakau (Takari, B.S., & Dja'far, [2012](#)). Pengangkatan status Deli setaraf dengan Kesultanan Siak pada 1862 rupanya menguntungkan perusahaan dalam mendapatkan tanah perkebunan. Pada awal pendiriannya di 1864, Jacob Nienhuys sang pionir mampu melakukan perjanjian cerdas pada penguasa Deli dengan menyewa tanah seluas 2400 hektar (4000 bau) selama 20 tahun, dengan pola 10 tahun bebas sewa dan 10 tahun berikutnya dikenakan biaya 200 dolar per tahun (Darsono et al., [2017](#)). Di kemudian hari perusahaan-perusahaan lain dengan mudah melakukan konsesi tanah pada “sultan-sultan” yang berkuasa melalui pola-pola serupa Jacob Nienhuys.

Pengangkatan sultan pada daerah lain seperti Langkat, Serdang, Asahan, dan wilayah lainnya telah menjadi instrumen penting bagi lahirnya sistem perkebunan berikut sistem politik kolonial di Sumatera Timur (Anwar, [2016](#)). Secara ekonomi, Sumatera Timur terbuka kepada para investor-investor lainnya. Namun secara politis, Sumatera Timur adalah bagian dari kawasan Hindia-Belanda. Hal ini diperjelas melalui Traktat Sumatera (*Sumatra tractaat*) pada 1871. Isinya adalah Belanda melepaskan tuntutan apa pun yang dimilikinya di Malaka, sementara pemerintahan Inggris di Malaka (Straits Settlements) tidak punya campur tangan di Sumatera Timur kecuali operasi kepentingan ekonomi Inggris yang tidak dihalang-halangi (Breman, [1997](#)).

Tekad Hindia-Belanda untuk berkuasa penuh secara politis di Sumatera Timur adalah karena posisinya yang sedang membutuhkan pengisian kas negara akibat Perang Jawa yang merugikan. Sebab, Sumatera Timur memiliki tanah yang berpotensi besar secara ekonomi. Selain itu, Sumatera Timur juga menjadi titik penting dalam penaklukan Aceh. Keinginan Belanda adalah menguasai seluruh daratan Sumatera menjadi bagian kawasan Hindia-Belanda. Pengangkatan sultan-sultan sebagai penguasa Deli, Serdang, Langkat, dan Asahan bertujuan membentuk struktur politik atas dasar “asas teritorial” dan “asas hierarki” agar wilayah-wilayah tersebut tidak memiliki keinginan untuk kembali pada kesultanan induk atau bahkan untuk bergabung dalam menentang kekuasaan kolonial (Marsden, [2008](#)). Selain itu pembentukan konsep “asas teritorial” dan “asas hierarki” juga menjaga kekuasaan Belanda dari niat Inggris atau negara-negara Eropa lainnya atas Sumatera Timur. Padahal asas tersebut bukanlah sebagai ciri khas struktur sosial masyarakat di Sumatera Timur. Namun, yang paling penting adalah penyederhanaan konsesi tanah, yang mana Belanda cukup mengadakan perjanjian dengan pihak kesultanan daripada seluruh warga Deli dalam kepemilikan tanah secara adat dan komunal.

Fondasi ekonomi Hindia-Belanda di Sumatera Timur terletak pada perusahaan Deli Maatschappij. Meskipun kelihatan sebagai perusahaan swasta, namun setengah saham negara ada di perusahaan tersebut. Nederlandsche Handels Maatschappij (NHM) adalah perusahaan kerajaan Belanda yang beroperasi di Hindia-Belanda sebagai pemegang mayoritas saham dari Deli Maatschappij. Karena itu tidak heran apabila Deli Maatschappij cukup leluasa melakukan berbagai kebijakan. Seperti konsesi tanah antara perusahaan dengan kesultanan yang difasilitasi oleh pemerintah kolonial. Termasuk pada membuat aturan-aturan tenaga kerja *Poenali Sanctie* yang sebenarnya dianggap lebih ke arah kebijakan “perbudakan” atau dengan membuat kebijakan mata uang perkebunan meskipun di saat yang sama Hindia-Belanda mencoba menanamkan pengaruh melalui mata uang gulden (Sinaga, [2018](#)).

Kawasan Perkebunan Deli

Wilayah Deli adalah tonggak kebangkitan sistem kapitalis perkebunan di Sumatera Timur. Dalam jangka waktu tidak sampai setengah abad sejak Deli Maatschappij berdiri pada 1865, jumlah perkebunan meningkat hingga 153 pada 1889. Sejumlah 47 perusahaan ada di Deli dan sisanya tersebar pada wilayah lain seperti Serdang, Langkat, Asahan, Batubara, hingga Siak. Sistem perjanjian dan pengelolaan tanah perkebunan hampir meniru apa yang dilakukan perusahaan di Deli, khususnya Deli Maatschappij.

Wilayah Deli pada awal kedatangan Jacob Nienhuys masih didominasi oleh hutan dan semak belukar. Memang ada juga berbagai ladang dan perkebunan milik pribumi yang konon menurut Anderson, dalam *Mission to the East Coast of Sumatra in 1824* memiliki berbagai komoditas pertanian dengan produk unggulannya lada (Anderson, [1826](#)). Akan tetapi perkebunan pribumi tidak mempengaruhi secara signifikan bentang alam yang masih liar, sebab sejak kedatangan Anderson sampai kedatangan Jacob Nienhuys kondisi dan jumlah penduduk pribumi tidak banyak berubah (Leushuis, [2014](#)). Sebagai catatan penting tapi sering terlewatkan adalah gambaran struktur sosial Deli. Orang Melayu sebagai penduduk asli berjumlah sekitar 2000 jiwa yang tersebar di seluruh

kawasan. Sekitar 200 orang menempati daerah Labuhan Deli sebagai pusat wilayah Deli dengan pemimpinnya yang tidak jauh berbeda dari kawulanya (rakyatnya). Hal ini dibuktikan oleh Nienhuys sendiri dalam penggambaran rumahnya yang hanya sedikit lebih tinggi dari rumah kebanyakan. Setiap orang memang menghormati sang pemimpin, namun tidak seperti hubungan penghormatan kerajaan di Jawa antara raja dengan rakyat. Penghormatan pemimpin di Deli hanya sebagai pemangku adat tanpa kekuatan (*state domain*).



Gambar 1. Pengangkatan Tengkoek Besar sebagai Sultan Deli ke-X
Sumber: KITLV

Menurut Purwanto, tingkatan elite lokal di Sumatera Timur setidaknya paling tinggi setara dengan bupati. Bukan sebagai raja atau pemimpin negara dalam suatu kawasan yang berdaulat, baik secara politis maupun batas-batas wilayah yang tegas (Purwanto, 2009). Oleh sebab itu, pada dasarnya elite lokal tersebut lebih tepat disebut sebagai *chiefdom* daripada sebagai *kingdom*. Elite lokal di Sumatera Timur memiliki sistem kepemimpinan lebih ke arah sistem adat dengan keputusan dilakukan secara bersama-sama melalui rapat adat yang lebih kelihatan seperti musyawarah di suatu desa. Dalam studi komparatif oleh antropolog E. M. Bruner (1959-1963) menunjukkan bahwa kecenderungan masyarakat pendatang, dalam hal ini masyarakat Batak, di Deli (Medan) mengorientasikan dan mengintensifkan adat-istiadat tradisionalnya sendiri dibandingkan di kampung halamannya. Berbeda misalnya masyarakat Batak sebagai pendatang di Bandung yang meskipun tidak larut, berbaur dengan sistem adat setempat. Begitu juga dengan suku bangsa lain yang sejak awal pembukaan perkebunan di tanah Deli datang atau didatangkan kolonial menjadi masyarakat dominan. Adat istiadat Melayu tidak mempengaruhi para pendatang tersebut, kecuali label Islam di belakang kata 'Melayu', itu pun tidak bertahan pada masa kini.

Barangkali perlu juga menelusuri bukti dari bangunan *heritage* yang berkaitan pada kekuasaan Kesultanan Deli. Namun, konsep bangunan justru mempertegas bahwa kekuasaan elite lokal tidak hadir sama sekali. Istana kesultanan, kantor kesultanan, hingga mesjid megah yang ada dibangun berdasarkan konsep Barat tanpa unsur lokal. Pada era kekinian warisan tersebut diperparah dengan pengabaian, pembongkaran, atau penambahan bangunan modern yang sangat melanggar estetika. Berbeda misalnya jika membandingkannya pada istana Kesultanan Siak atau Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Paling tidak unsur lokal terlihat sebagai bukti kekuasaan elite lokalnya dalam dua kutub antara kolonial dan tanah jajahan. Tidak heran jika terasa sulit untuk menyelamatkan situs-situs sejarah di Kota Medan pada masa sekarang.

Sementara itu, dalam membayangkan pusat kekuasaan Kesultanan Deli, baik secara historis maupun kekinian masih membingungkan. Meskipun dalam catatan historis kekuasaan kesultanan berada di Labuhan Deli, namun penjelasan para pionir memiliki nuansa berbeda dari sebuah kesultanan yang berdaulat. Konsep wilayahnya centang perenang yang sepertinya terbiasa dengan keadaan banjir dan tanah yang berlumpur. Nienhuys yang awalnya bertempat tinggal di Labuhan Deli

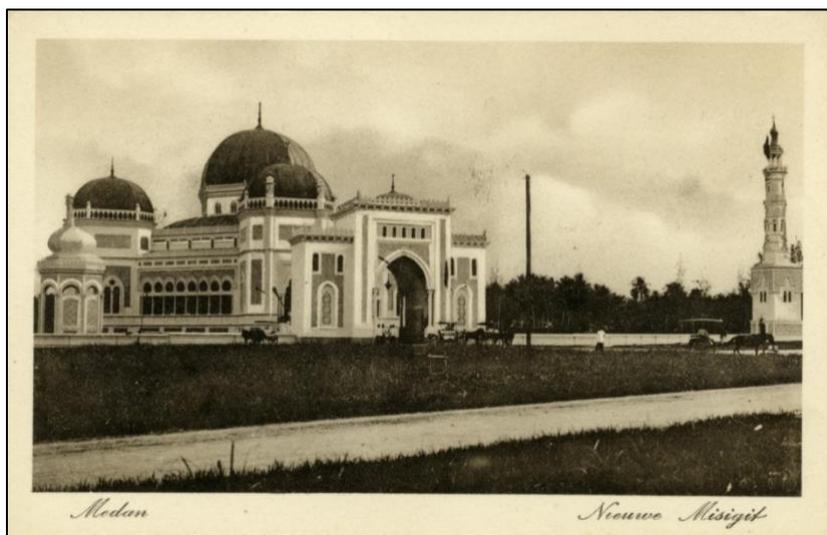
tidak tahan dengan kondisi tersebut sehingga ia memindahkan kantornya lebih ke pedalaman, yakni ke wilayah Medan sekitar 20 km dari Labuhan Deli. Dalam jangka 10 tahun, kantor keresidenan juga pindah ke sana yang pada akhirnya diikuti oleh elite lokal bersama hadiah sebuah istana untuk Kesultanan Deli.



Gambar 2. Kantor Sultan Deli, Medan

Sumber: Leiden University Libraries, KITLV Collection Shelf Location 1402004.

Persoalan Medan sebagai pusat administrasi adalah contoh polemik dalam historiografi politik di Sumatera Timur. Sebagai kota yang maju dan berkembang pesat diklaim para sejarawan lokal sebagai kota yang telah berusia ±400 tahun. Luckman Sinar menyebut bahwa Medan pada awalnya sebagai kampung. Ada pula yang menyebut Medan sebagai wilayah percobaan tanaman perkebunan kolonial. Namun yang masih menjadi kontroversi adalah bahwa Medan dibangun oleh Guru Patimpus, seorang Karo yang datang dari pegunungan untuk bermukim di sana (Sinar, 1991). Sosok Guru Patimpus sendiri masih diragukan keberadaannya dalam tradisi lokal, sebab memang tidak ditemukan sama sekali, siapa dan untuk apa penciptaan sosok itu, barangkali berkaitan dengan saling klaim otoritas wilayah antara Batak dan Melayu. Namun yang jelas adalah bahwa banyak hal yang menandai tidak adanya konsep *state domain* atas elite lokal. Baik di Deli (Medan) sendiri ataupun di seluruh wilayah Sumatera Timur.



Gambar 3. Masjid Raya Medan

Sumber: Leiden University Libraries, KITLV Collection Shelf Location 1403374.

Status tanah di Deli tidak bisa disetarakan sebagai *bovenladen* maupun *vorstenlanden* seperti di Jawa. Justru yang ada adalah bentuk *afdeling* (setingkat kewedanaan) yang disematkan pada Deli,

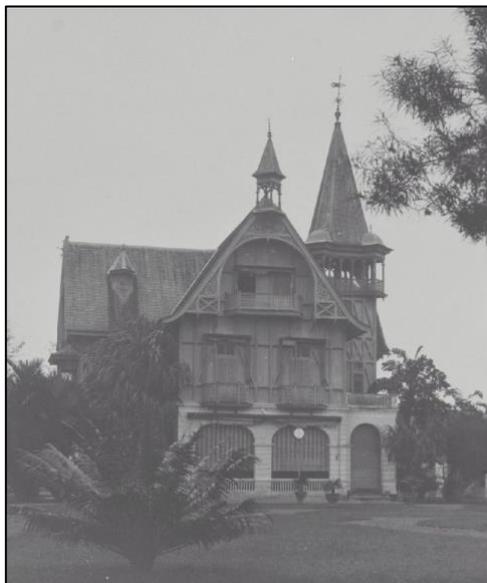
Serdang, Langkat, dan Bedagai. Sementara kepemilikan tanah dikuasai secara komunal oleh masyarakat sebelum adanya perkebunan. Elite lokal pra-kolonial hanya berstatus ketua adat yang memutuskan kepemilikan tanah secara adat pula. Ketika kolonial datang, maka status tanah tersebut cenderung berubah menjadi milik penguasa lokal atau tanah tak terpakai sebelum dilimpahkan kepada perusahaan perkebunan yang mendapat hak konsesi (Purwanto, 2009). Maka Deli Maatschappij sebagai perusahaan perkebunan yang baru berdiri pada 1869 langsung dapat menguasai tanah seluas 200.000 hektar hanya dalam jangka waktu 20 tahun. Belum ada sebelumnya dalam sejarah kolonial suatu perusahaan atau bahkan negara yang dapat melakukan konsesi semacam itu. Dasar-dasar hak dan kepemilikan tanah telah disusun secara cermat untuk menguasainya melalui sistem politik kawasan yang dilakukan oleh pihak kolonial. Hal ini sangat mempengaruhi sistem sosial dan budaya yang terbentuk setelahnya.

Perhitungan secara kasar jumlah penduduk Deli pra-kolonial berkisar 2000 orang. Bisa lebih atau kurang, namun wilayah tersebut masih didominasi oleh hutan-hutan purba yang penuh ancaman binatang buas. Berapa pun jumlah pastinya, wilayah Deli bukanlah wilayah terbuka. Masyarakat bisa *berladang reba* (ladang berpindah) karena kawasan yang masih luas. Akan tetapi ketika perkebunan datang, sistem sosial dan budaya langsung berubah secara signifikan. *Berladang reba* dilarang dan diganti dengan tanah jaluran. Kantong-kantong perkebunan dijalankan bersama tumbuhnya emplasemen-emplasemen yang diisi para kuli dan *controleur*. Pribumi setempat bersentuhan dengan pribumi pendatang yang semakin lama semakin dominan. Pada akhirnya serbuan pendatang mempengaruhi kebiasaan setempat dalam memandang tanah sebagai hak kepemilikan. Tentunya pengaruh tersebut terjadi karena sistem perkebunan yang berkembang dan diprakarsai oleh elite lokal dan kolonial. Dampaknya adalah kekacauan kepemilikan tanah, baik pada masa kolonial dan berkembang secara luas di masa kemerdekaan (Reid, 2012).



Gambar 4. Istana Maimun, Medan
Sumber: Tropen Museum Royal Tropical Institute.

Konsekuensi atas kepemilikan tanah tersebut telah dimulai pada masa kolonial ketika pecah Perang Sunggal pada 1872. Sebab pecahnya Perang Sunggal bermula dari konsesi antara Kesultanan Deli dengan perkebunan Eropa. Pihak Barat merasa bahwa setelah penguasa Deli diangkat setaraf dengan Sultan Siak, maka mereka bebas untuk melakukan berbagai perjanjian konsesi (Perret, 2010). Tetapi, ternyata tidak semua wilayah yang masuk ke dalam teritorial Deli “menjadi” milik sultan dapat dilakukan konsesi. Menurut Erman konsesi di wilayah Sunggal terjadi secara sepihak antara kolonial dengan kesultanan. Sunggal menolak sistem tersebut karena pemimpin lokal masih menganggap hak atas tanah dan usaha mempertahankan sebuah sistem tradisional yang tentunya berhadapan dengan sultan (Erman, 1985). Sikap seperti itu justru memperlihatkan rapuhnya kekuasaan sultan Deli di wilayahnya sendiri, khususnya Sunggal.



Gambar 5. Istana Tengkoek Besar, Kota Maksu, Medan

Sumber: Tropen Museum Royal Tropical Institute.

Peristiwa Perang Sunggal menunjukkan awal dari suatu persoalan kepemilikan atas tanah di Sumatera Timur. Pada perkembangan selanjutnya masalah kepemilikan tanah tidak berhenti, dan terus meningkat dengan berbagai persoalan lain yang mengikuti. Setelah kemerdekaan, persoalan tanah tidak lagi sebatas perusahaan dengan pribumi setempat, melainkan dengan pribumi pendatang, bangsa asing, kapitalis, hingga negara yang mengambil alih perkebunan asing. Konsesi yang semestinya kembali pada pemilik tanah setelah jangka waktu tertentu malah menjadi ajang perebutan yang biasanya dimenangkan oleh para kapitalis. Hal ini disebabkan wujud *patron client* tidak terjadi pada wilayah kesultanan.

Deli pada dasarnya dimiliki secara komunal oleh masyarakat pribumi yang bukan pendatang. Tetapi pengelolaannya menjadi bersifat pribadi ketika pemangku adat diangkat sebagai sultan. Terlebih ketika sultan dibuatkan istana di Medan, mengikuti perusahaan perkebunan yang telah lebih dulu menempati wilayah tersebut, termasuk juga Residen Sumatera Timur yang juga ikut pindah ke Medan, menegaskan bahwa sistem pemerintahan memiliki dasar hukum global dalam tanah jajahan. Hibah tanah ataupun konsesi mewarnai kepemilikan tanah koloni. Sistem ini yang juga digunakan pada wilayah-wilayah lainnya di seluruh Sumatera Timur. Kepala adat yang naik derajat sebagai sultan adalah ciri umum dalam pembentukan Keresidenan Sumatera Timur sebagai politik kawasan dalam jajahan kolonial Belanda. Ketika industri perkebunan mempengaruhi perubahan-perubahan sosial, kesultanan tidak memiliki daya apa pun untuk menancapkan pengaruh *vorstenlanden* di wilayahnya, sebab memang pada dasarnya kesultanan tidak memiliki tanah secara pribadi. Keadaan ini bisa dilihat pada situasi kekinian, di mana perebutan hak kepemilikan bekas perkebunan terjadi pada negara, masyarakat dan pengusaha.

SIMPULAN

Deli sebagai kesultanan memiliki batasan periodik historis yang hanya berlaku pada masa kolonial. Pembentukan Kesultanan Deli diangkat statusnya sebagai *kingdom* oleh pihak kolonial menggantikan sifat awalnya sebagai *chiefdom* karena berbagai kepentingan politik. Pertama, pihak kolonial ingin memantapkan kekuasaan secara politik di Sumatera Timur dalam mengimbangi kekuasaan Inggris di Malaka. Kedua, pihak kolonial membentuk wilayah strategis secara militer untuk tujuan penguasaan wilayah Sumatera yang saat itu hanya Aceh yang masih belum tertaklukkan. Ketiga, melegalisasikan penguasaan tanah melalui berbagai bentuk perjanjian dan konsesi antara dua penguasa, yakni penguasa lokal dengan pihak kolonial tanpa memperhatikan bentuk kepemilikan tanah di Sumatera Timur yang bersifat secara komunal. Pada akhirnya politik kawasan ini dibangun melalui asas hierarki

dan asas teritorial yang berlaku pada daerah-daerah di Sumatera Timur. Secara meyakinkan, wilayah Sumatera Timur terbentuk sebagai daerah administrasi baru Hindia-Belanda yang terbentuk pada pertengahan abad ke-19, sampai pada akhirnya wilayah tersebut melebur sebagai kawasan baru Sumatera Utara ketika Indonesia merdeka.

REFERENSI

- Anderson, J. (1826). *Mission to The East Coast of Sumatra*. Edinburgh: Blackwood.
- Anwar, S. (2016). *Transportasi Perkotaan di Medan pada Paruh Pertama Abad ke-20 M*. Unvesitas Gadjah Mada.
- Azhari, I., Pakpahan, R., Tanjung, M., Faridah, & Abdurrahman, M. K. (2013). *Kesultanan Serdang: Perkembangan Islam pada Masa Pemerintahan Shariful Alamsyah*. Jakarta: Puslitbang Lektur dan Khazanah Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.
- Breman, J. (1997). *Menjinakkan Sang Kuli: Politik Kolonial Tuan Kebun dan Kuli di Sumatera Timur pada Awal Abad ke-20* (K. S. Toer, Trans.). Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Darsono, Astiyah, S., Azhari, I., Suryanti, E. T., & Akbar, A. (2017). *Berjuang dengan Uang Mempertahankan dan Memajukan Republik Indonesia: Semangat Juang Otoritas dan Masyarakat Sumatera Utara* (cetakan pe). Jakarta: Bank Indonesia Institute.
- Erman, E. (1985, April). Pemberontakan Sunggal di Deli. *Majalah Ilmu-Ilmu Sosial*.
- Gottschalk, L. (1986). *Mengerti Sejarah*. Jakarta: UI Press.
- Kuntowijoyo. (1994). *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Leushuis, E. (2014). *Panduan Jelajah Kota-kota di Indonesia*. Yogyakarta: Ombak.
- Marsden, W. (2008). *Sejarah Sumatra*. Jakarta: Komunitas Bambu.
- Pelzer, K. J. (1985). *Toeang Keboen dan Petani: Politik Kolonial dan Perjuangan Agraria 1863-1947* (J. Rumbo, Trans.). Jakarta: Sinar Harapan.
- Perret, D. (2010). *Kolonialisme dan Etnisitas: Batak dan Melayu di Sumatera Timur Laut*. Jakarta: KPG.
- Purwanto, B. (2009). Menelusuri Akar Ketimpangan dan Kesempatan Baru: Catatan Tentang Sejarah Perkebunan Indonesia. Retrieved October 17, 2022, from sejarah.fib.ugm.ac.id website: <http://wisatadanbudaya.blogspot.com/2009/11/menelusuri-akar-ketimpangan-dan.html>
- Reid, A. (Ed.). (2010). *Sumatera Tempo Doeloe, dari Marco Polo sampai Tan Malaka*. Jakarta: Komunitas Bambu.
- Reid, A. (2012). *Sumatera: Revolusi dan Elite Tradisional*. Jakarta: Komunitas Bambu.
- Schadee, W. H. M. (1918). *Kroniek 1917 Samengesteld Voor De Jaarvergadering*. Amsterdam: Druk van J. H. de Bussy.
- Sinaga, D. M. (2018). Aktivitas Perdagangan Deli Maatschappij Di Sumatera Timur Tahun 1870-1930. *Avatara*, 6(1).
- Sinar, T. L. (1991). *Sejarah Medan Tempo Doeloe*. Medan: Majelis Adat Budaya Melayu Indonesia.
- Sinar, T. L. (2006). *Bangun dan Runtuhnya Kerajaan Melayu di Sumatera Timur*. Medan: Yayasan Kesultanan Serdang.
- Takari, M., B.S., A. Z., & Dja'far, F. M. (2012). *Sejarah Kesultanan Deli dan Peradaban Masyarakatnya*. Medan: Universitas Sumatera Utara Press.